

**KINERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)  
DALAM PENCEGAHAN BENCANA BANJIR DI KECAMATAN  
RAMBAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2022**

**Oleh: Selvi Pebriani**

**Pembimbing : Dra. Wan Asrida, M.Si**

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax.0761-63277

**ABSTRACT**

*In this research, there are several problematic phenomena that were raised in 2022 in the performance of the Rokan Hulu Regional Disaster Management Agency (BPBD) in preventing floods in Rambah District, namely first, the number of flood events in Rambah District has increased from 2021 - 2022, the number of houses and public facilities that experiences damage due to floods that are not resolved every year and there are complaints from the public regarding the slow response of the Rokan Hulu BPBD in preventing floods which causes floods to continue to occur every month. From the above phenomenon, the aim of this research is to determine the performance of the regional disaster management agency (BPBD) in preventing flood disasters in Rambah District, Rokan Hulu Regency in 2022 along with the inhibiting factors.*

*This research is descriptive research with a qualitative approach. The types of data are primary data and secondary data, primary data is obtained directly from informants. Meanwhile, secondary data is data that supports or strengthens primary data. Data collection techniques were carried out by means of interviews and documentation.*

*The results of this research indicate that the performance of the Rokan Hulu BPBD has not been optimal according to its duties and functions in preventing floods, especially in Rambah District, socialization programs and physical infrastructure development for preventing flooding in the community have not been implemented. There are inhibiting factors in the form of a lack of coordination between agencies, inadequate operational vehicles, limited budgets that do not match the initial submission in the Draft Work Plan (RENJA), and the existence of global climate change which is very drastic so that disaster prevention is difficult to implement.*

**Keywords: Bureaucratic Performance, Regional Disaster Management Agency (BPBD), Flood Prevention.**

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia terletak di wilayah rawan terhadap berbagai kejadian bahaya alam, seperti gempa, longsor, tsunami, dan banjir. Kejadian bencana yang paling sering terjadi di Indonesia adalah banjir. Banjir merupakan bencana alam yang paling sering terjadi di hampir semua wilayah Indonesia dengan data kejadian banjir yang tinggi sebanyak 1.520 kejadian di Indonesia pada tahun 2022 menurut Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) ([dibi.bnpb.go.id](http://dibi.bnpb.go.id)).

Salah satu Provinsi yang mengalami bencana banjir paling tinggi di Indonesia yaitu Provinsi Riau dengan jumlah bencana sebanyak 94 kejadian. Karena hal tersebut maka dari itu Provinsi Riau menjadi salah satu fokus Pemerintah. Jika bencana sering terjadi, maka yang harus dipertanyakan adalah kinerja dari Pemerintah Daerah sendiri. Dalam hal ini dapat kita lihat dari Kinerja BPBD Kabupaten/Kota. Selain itu, kita juga harus melihat kerjasama antar organisasi Pemerintah dalam menangani bencana yang terjadi terutama banjir.

Bencana banjir menjadi tragedi rutin di musim penghujan yang meluas di berbagai Daerah Aliran Sungai (DAS) di sebagian besar Provinsi Riau. Pada musim hujan jumlah kejadian banjir terus meningkat, demikian juga dengan jumlah korban manusia dan kerugian harta benda serta sarana dan prasarana umum/sosial, prasarana transportasi dan prasarana pertanian/pengairan. Dengan adanya kondisi tersebut maka diperlukan upaya untuk cepat melakukan suatu langkah Penanggulangan seperti

menolong korban, menyelamatkan korban dan barang yang berharga, memberi kenyamanan untuk tempat tinggal sementara, memenuhi kebutuhan para korban, melayani untuk kesehatan korban dan menyediakan air bersih serta sanitasi.

Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, pada Pasal 18 juga mengamanatkan dibentuknya BPBD di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota. Pembentukan BPBD didasarkan pada regulasi daerah, Pemerintah Pusat menyerahkan pembentukan BPBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), yang harus berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan BNPB. Sehingga, saat ini sebagian provinsi yang rawan bencana di Indonesia telah diwajibkan mendirikan BPBD (Syafri,2018).

Melihat dampak banjir yang terjadi, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu harus melakukan tindakan dengan cepat. Sehingga masalah banjir ini tidak terjadi berlarut-larut. Pemerintah harus sesegara mungkin mencari solusi untuk permasalahan yang ada. Setidaknya pemerintah dapat melakukannya secara bertahap agar dampak dari bencana banjir tidak begitu merugikan sarana dan prasarana umum yang ada (Aulia,2022). Berikut adalah kecamatan yang banyak terjadi banjir di Kabupaten Rokan Hulu pada tabel dibawah ini:

**Tabel 1.2 Data Bencana Banjir pada Kecamatan di Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2022**

No.	Kecamatan	Frekuensi Banjir
1.	Kec. Rambah	39
2.	Kec. Tambusai	21
3.	Kec. Kabun	9
4.	Kec. Rambah Samo	2
5.	Kec. Bangun Purba	1
6.	Kec. Rambah Hilir	1
7.	Kec. Tandun	1
8.	Kec. Pagaran Tapah	-
9.	Kec. Rokan IV Koto	-
10.	Kec. Bonai Darussalam	-

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Rokan Hulu, 2022.

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa bencana banjir paling banyak terjadi di Kecamatan Rambah dimana terdapat 27 kejadian banjir sepanjang tahun 2022, dan diikuti oleh beberapa Kecamatan lainnya seperti Kecamatan Tambusai, Kabun dan lain sebagainya. Permasalahan penanggulangan bencana banjir di Kabupaten Rokan Hulu tampak semakin berat dan kompleks, sehingga membutuhkan perhatian khusus dan *urgent* dari semua pemangku kepentingan (Harahap, 2022). Dalam penanggulangan bencana banjir tersebut, kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Rokan Hulu sebagai lembaga yang berwenang dibidang kebencanaan, dituntut untuk bekerja secara optimal.

Kinerja BPBD dalam penanggulangan bencana banjir di

Kabupaten Rokan Hulu membutuhkan koordinasi yang baik dari berbagai pihak, serta diperlukannya dukungan dari pemerintah daerah untuk merealisasikan kebutuhan sarana dan prasarana yang dibutuhkan BPBD Kabupaten Rokan Hulu. BPBD Kabupaten Rokan Hulu sudah cukup serius dalam menanggulangi banjir, hanya saja program kerja yang sudah direncanakan memerlukan waktu yang cukup lama untuk melaksanakan seluruh program yang dibuat oleh BPBD Kabupaten Rokan Hulu dalam menanggulangi banjir.

Tanggung jawab BPBD Rokan Hulu dalam pencegahan bencana merupakan salah satu upaya untuk mencegah terjadinya bencana dan dampak yang timbul, perlu diadakan kegiatan berkelanjutan untuk mengurangi dan menghilangkan bencana banjir baik jangka panjang maupun jangka pendek. Pada tahun 2022 peneliti menemukan permasalahan terhadap pencegahan banjir di Kecamatan Rambah Rokan Hulu oleh BPBD Rokan Hulu tidak berjalan dengan baik, peneliti menemukan data bahwa terdapat kenaikan titik banjir pada dari tahun 2021 sampai tahun 2022 di Kecamatan Rambah sebagai berikut:

**Tabel 1.3 Perbandingan Bencana Banjir di Kecamatan Rambah Rokan Hulu Tahun 2021-2022**

No	Bulan Kejadian	Jumlah Kejadian	
		2021	2022
1.	Januari	2	6
2.	Februari	0	1
3.	Maret	4	5
4.	April	2	2
5.	Mei	1	1
6.	Juni	2	0
7.	Juli	2	3

8.	Agustus	0	2
9.	September	0	0
10.	Oktober	1	2
11.	November	1	1
12.	Desember	9	16
<b>Total</b>		<b>24</b>	<b>39</b>

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Rokan Hulu, 2022.

Pada tabel diatas terlihat perbandingan bencana banjir di Kecamatan Rambah rokan hulu mengalami kenaikan dari 24 kejadian banjir pada tahun 2021 menjadi 39 kejadian pada tahun 2022, hal ini tentu menjadi bukti bahwa pencegahan banjir di Kecamatan Rambah Rokan Hulu mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Bencana banjir tersebut tentu memiliki dampak bagi masyarakat Kecamatan Rambah baik kerusakan barang pribadi maupun kerusakan infrastruktur sekitar, berikut adalah data kerusakan rumah dan fasilitas umum akibat banjir di Kecamatan Rambah Rokan Hulu tahun 2022.

**Tabel 1.4 Jumlah Kerusakan Rumah dan Fasilitas Umum Akibat Banjir Di Kecamatan Kabupaten Rambah Rokan Hulu Tahun 2022**

No	Lokasi Kejadian	Rumah Unit	Fasilitas Umum (Unit)
1.	Desa Babussalam	564	2
2.	Desa Pematang Berangan	100	1
3.	Desa Kota Tinggi	50	0
4.	Kelurahan PasirPengaraian	152	1
<b>Total</b>		<b>865</b>	<b>4</b>

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Rokan Hulu, 2022.

Berdasarkan data diatas terdapat bahwa sebanyak 865 Unit rumah masyarakat dan 4 unit fasilitas umum mengalami kerusakan akibat banjir, kerusakan tersebut dapat dikategorikan kerusakan parah dan terdapat beberapa kerusakan sedang, terlihat pada gambar diatas juga rumah warga terendam banjir yang sangat parah dan jalan yang rusak akibat tergenang air yang berkepanjangan. Peneliti juga melakukan wawancara kepada Ketua RW Desa Babussalam yang banyak menerima keluhan masyarakat terkait banjir yang tidak diatasi dengan baik. Dari permasalahan diatas dapat ditarik kesimpulan dimana fenomena penelitian yang diangkat peneliti yaitu:

1. Jumlah kejadian banjir di Kecamatan Rambah mengalami kenaikan dari tahun 2021 – 2022.
2. Banyaknya rumah dan fasilitas umum yang mengalami kerusakan akibat banjir yang tidak teratasi setiap tahunnya.
3. Adanya keluhan masyarakat terkait lambatnya respon BPBD Rokan Hulu dalam pencegahan banjir, akibatnya banjir terus terjadi setiap bulannya.

Berdasarkan fenomena diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam Pencegahan Bencana Banjir di Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2022” dimana badan yang seharusnya menjadi tumpuan awal ketika terjadi bencana dan diharapkan dapat memiliki

kinerja yang optimal dalam pencegahan bencana terutama banjir di Kecamatan Rambah Rokan Hulu sehingga bencana banjir ini tidak terjadi berkepanjangan dan tidak merugikan banyak masyarakat.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan diatas, maka masalah yang akan dirumuskan dalam penelitian ini antara lain:

1. Bagaimana Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam pencegahan bencana banjir di Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2022?
2. Apa faktor penghambat kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam pencegahan bencana banjir di Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2022?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mendeskripsikan kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam pencegahan bencana banjir di Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2022.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam pencegahan bencana banjir di Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2022.

### **D. Kerangka Teori**

Kinerja adalah hasil dari suatu proses yang mengacu dan diukur selama periode waktu tertentu berdasarkan ketentuan atau kesepakatan yang telah ditetapkan sebelumnya. Kinerja merupakan hasil kerja yang dicapai oleh

seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing, dalam rangka upaya mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum, dan sesuai dengan moral maupun etika Prawirosentono dalam (Sutrisno, 2010).

Selanjutnya Birokrasi yang dalam bahasa Inggris, *bureaucracy*, berasal dari kata *bureau* (berarti meja) dan *cratin* (berarti kekuasaan), artinya kekuasaan berada pada orang-orang yang di belakang meja. Di Indonesia, birokrasi cenderung dikonotasikan sebagaimana telah digambarkan seperti di atas. Istilah birokrasi sering sekali dikaitkan dengan organisasi pemerintahan, padahal sebenarnya, konsep birokrasi yang digagas Max Weber itu bisa terjadi tidak hanya di organisasi pemerintah, akan tetapi bisa juga terjadi di organisasi non pemerintah atau swasta.

Berdasarkan definisi diatas maka dapat dijelaskan bahwa kinerja birokrasi instansi pemerintah ini dapat dikatakan berhasil jika terdapat bukti-bukti atau indikator-inidikator atau ukuran keberhasilan yang mengarah pada pencapaian visi, misi ataupun strategi organisasi tersebut. Tanpa adanya pengukuran kinerja akan sangat sulit dicari pembenarannya yang logis atas pencapaian organisasi. Sebaliknya, dengan disusunnya perencanaan strategi yang jelas, perencanaan operasional yang terukur, dapat diharapkan tersedia pembenaran yang logis dan argumentasi yang memadai untuk mengatakan suatu program berhasil atau gagal. Di dalam pengukuran kinerja sebuah organisasi publik, sedikitnya ada empat faktor yang harus dijadikan pertimbangan

dalam memberikan pelayanan Flynn dalam (Muhammad 2018), menawarkan beberapa indikator untuk mengukur kinerja birokrasi sebagai berikut:

#### 1. Ekonomi

Berdasarkan pengukuran Kinerja Birokrasi terkait ekonomi dapat dilihat bagaimana dana digunakan oleh organisasi sepanjang masa tertentu. Dalam praktiknya, pengukuran ini lebih ditekankan pada proses anggaran. Anggaran adalah keterbatasan uang dan dalam banyak kasus diproyeksikan dari tahun ke tahun dengan harapan tercipta tabungan efisiensi pada akhir tahun.

#### 2. Efisiensi

Pandangan yang lebih *sophisticated* adalah bagaimana efisiensi sumber daya digunakan dengan baik. Guna mewujudkan fungsi-fungsi yang ada, maka terdapat beberapa hal secara *primer* yang harus dimiliki antara lain sumber daya (SDM /aparatur serta sarana dan prasarana). Untuk kasus tertentu, kinerja organisasi tidak dapat dikur dengan efisiensi karena produk dari pelayanan publik tidak mudah untuk diukur.

#### 3. Efektivitas

Pengukuran efektivitas berkaitan dengan bagaimana mencari model pelayanan sesuai dengan yang diinginkan. Efektivitas juga merupakan gambaran strategi akan keberhasilan pelayanan suatu organisasi dalam mencapai tujuannya.

#### 4. Fleksibilitas

Penekanan dari fleksibilitas adalah pelayanan publik harus dapat merespon kejadian yang sifatnya emergency atau tidak terduga. Fleksibelitas dalam arti ada batas-batas yang harus diperhatikan karena

aspek ini kontradiktif dengan efisiensi dan penggunaan kapasitas yang maksimal.

### E. Metode penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah penelitian yang bersifat deskriptif-kualitatif dengan lokasi penelitian di mana penulis memperoleh data dan informasi dari informan yang terletak di Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu dan Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau. Data ini diperoleh melalui wawancara yang diawali dengan memberikan beberapa pertanyaan kepada informan, kemudian dilakukan pencatatan dari jawaban hasil wawancara tersebut. Lalu data sekunder merupakan sumber data tambahan yang diambil tidak secara langsung di lapangan, melainkan dari sumber yang sudah dibuat orang lain, misalnya: buku, jurnal, dokumen, foto, dan statistik dan data lainnya untuk mendukung penelitian. Didalam sumber data penelitian ini terdapat mulai dari informan penelitian, media massa, serta dokumen. Lalu yang terakhir ada teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan dokumentasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 3.1 Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam Pencegahan Bencana Banjir di Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2022

Dalam Peraturan Bupati Rokan Hulu No. 82 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah pada pasal 4 bagian a yaitu

“menetapkan pedoman dan pengarahannya terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan setara”. Pada rencana strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Renstra BPBD) Kabupaten Rokan Hulu tahun 2021-2026 dimana salah satu tugas seksi pencegahan dan kesiapsiagaannya yaitu “pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan mitigasi dan kesiapsiagaan pada pra bencana serta pemberdayaan masyarakat”. BPBD Rokan Hulu adalah garda terdepan dalam hal pencegahan bencana banjir di Kecamatan Rambah yang mana menjadi Kecamatan paling banyak terjadi banjir di Rokan Hulu, berikut adalah data kejadian bencana akibat banjir di Kecamatan Rambah Rokan Hulu Tahun 2022.

Namun dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BPBD Rokan Hulu tentu memiliki beberapa kendala yang menyebabkan pencegahan banjir menjadi terhambat. Untuk mengukur kinerja BPBD Rokan Hulu dalam pencegahan bencana banjir di Kecamatan Rambah peneliti menggunakan teori dari Kinerja Birokrasi yaitu: Ekonomi, Efisiensi, Efektivitas dan Keadilan (Flynn, dalam ). Agar peneliti dapat melihat Kinerja dari BPBD Rokan Hulu sudah baik dalam pencegahan bencana banjir di Kecamatan Rambah atau ada beberapa hal yang harus diperbaiki, untuk mengetahui lebih lanjut diuraikan sebagai berikut:

### **3.1.1 Ekonomi**

Berdasarkan pengukuran Kinerja Birokrasi terkait ekonomi

dapat dilihat bagaimana dana digunakan oleh organisasi sepanjang masa tertentu. Dalam praktiknya, pengukuran ini lebih ditekankan pada proses anggaran. Anggaran adalah keterbatasan uang dan dalam banyak kasus diproyeksikan dari tahun ke tahun dengan harapan tercipta tabungan efisiensi pada akhir tahun.

Anggaran merupakan penunjang penting dalam melaksanakan tugas dan fungsi dari suatu instansi pemerintahan, anggaran menjadi awal dalam merealisasikan suatu program kerja yang ada sehingga menghasilkan output yang sesuai. Namun, pada faktor penghambat kinerja BPBD Rokan Hulu dalam pencegahan banjir di Kecamatan Rambah, peneliti menemukan masalah pada terbatasnya anggaran yang dialokasikan oleh tim anggaran daerah dan tidak sesuai pada Rencana Kerja (RENJA) yang telah diajukan BPBD Rokan Hulu, hal ini lah yang membuat banyak kekurangan pada proses kerja semua program yang telah dirancang.

Berdasarkan data dari Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan BPBD Rokan Hulu Tahun 2021 bahwa anggaran BPBD Rokan Hulu Tahun 2021-2022 sebanyak Rp875.000.000 untuk menunjang berbagai tujuan dan sasaran yang ada. Beberapa program telah diberi anggaran oleh BPBD Rokan Hulu terkait tujuan meningkatkan pencegahan bencana dengan sasaran meningkatkan kualitas pelayanan dan disiplin aparatur terkait kebencanaan dengan terdapat delapan program pencegahan bencana serta indikator kinerja program (*outcome*) yang telah ditargetkan sebelumnya.

Namun terkait realisasi anggaran, peneliti sulit menemukan data secara akurat baik pada data anggaran maupun data pada LAKIP BPBD Rokan Hulu Tahun 2021-2022 karena tidak transparansinya BPBD Rokan Hulu untuk memberikan data realisasi anggaran agar dapat menjadi perbandingan dan bukti terkait persentase efektivitas anggaran yang digunakan dan bukti kuat bahwa terdapat kurangnya anggaran yang dialokasikan benar adanya dan bisa menjadi perbaikan untuk Tim Anggaran Daerah.

### 3.1.2 Efisiensi

Pandangan yang lebih *sophisticated* adalah bagaimana efisiensi sumber daya digunakan dengan baik. Guna mewujudkan fungsi-fungsi yang terdapat di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rokan Hulu, maka terdapat beberapa hal secara *primer* yang harus dimiliki oleh Badan, antara lain sumber daya (SDM /aparatur serta sarana dan prasarana) yang memfasilitasi kelangsungan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rokan Hulu. Pada kinerja aparatur dalam pencegahan bencana banjir di Kecamatan Rambah telah dilakukan beberapa cara oleh berupa mitigasi bencana banjir, sosialisasi rawan bencana banjir serta pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana banjir dengan data laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan BPBD Rokan Hulu berupa target dan realisasi terkait capaian indikator kinerja sasaran tahun 2022.

Selanjutnya terkait sarana dan prasarana yang memfasilitasi kelangsungan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rokan Hulu pada Tahun

2022. adanya fasilitas penunjang (alat perlengkapan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2022 dapat dijelaskan bahwa fasilitas penunjang BPBD di Kabupaten Rokan Hulu seperti sarana dan prasarana belum terlihat lengkap, banyak peralatan ataupun sarana prasarana yang rusak, rusak berat dan tidak ditemukan. Ditambah lagi di dalam lapangan semua peralatan bisa saja mengalami umur yang pendek, yang terlihat di atas terdapat sebagian peralatan yang sudah banyak mengalami kerusakan dan ada yang tidak bisa ditemukan.

### 3.1.3 Efektivitas

Pengukuran efektivitas berkaitan dengan bagaimana mencari model pelayanan sesuai dengan yang diinginkan. Efektivitas juga merupakan gambaran strategi akan keberhasilan pelayanan suatu organisasi dalam mencapai tujuannya. Dalam pencegahan bencana banjir di Kecamatan Rambah, efektifitas pelayanan BPBD Rokan Hulu dapat terlihat apabila banjir di Kecamatan Rambah setiap tahunnya mengalami penurunan, dimana rumusan kebijakan yang dikeluarkan serta solusi yang dihadirkan mampu mengatasi masalah banjir di Kecamatan Rambah sehingga jumlah korban yang terdampak, jumlah rumah dan fasilitas umum yang rusak mengalami penurunan. Namun pada kenyataannya, pelayanan BPBD Rokan Hulu belum terlaksana sebagaimana mestinya, dilihat dari perbandingan kejadian bencana banjir di Kecamatan Rambah mengalami kenaikan dari tahun 2021-2022.

Berdasarkan data-data yang dikumpulkan terkait tujuan

pelayanan dan program-program dari BPBD Rokan Hulu dalam pencegahan banjir belum terlaksana sebagaimana mestinya, sudah dilakukan pembuatan kajian resiko bencana banjir, namun belum terdapat upaya upaya serta kebijakan yang dikeluarkan dan dilaksanakan untuk pecegahan banjir secara nyata baik yang dilakukan oleh BPBD Rokan Hulu langsung maupun kolaborasi dengan dinas terkait. Belum ada langkah yang dilakukan seperti pembangunan fisik maupun hal hal lain yang dapat mencegah banjir agar tidak mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal ini membuat nilai guna BPBD Rokan Hulu dalam pencegahan banjir belum memenuhi harapan dari tujuan awal. Perlu adanya tindakan nyata dari rumusan rumusan kajian yang telah di buat sehingga masyarakat melihat jika memang BPBD Rokan Hulu telah melaksanakan tugasnya yang tertulis dalam PP No. 2 Tahun 2018 salah satunya pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana.

#### **3.1.4 Fleksibilitas**

Penekanan dari fleksibilitas adalah pelayanan publik harus dapat merespon kejadian yang sifatnya *emergency* atau tidak terduga. Pada saat tanggap darurat dan pasca bencana dengan beberapa kegiatan dan program-program yang belum terlaksana seperti pada kegiatan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat tentang bahaya bencana banjir cuma diadakan di beberapa desa saja di Kecamatan Rambah. Hal ini karena kurangnya anggaran yang ada dan penyelenggaraan pencegahan bencana yang dasarnya tidak efektif bisa disebabkan oleh lemahnya koordinasi, pedoman atau SOP yang tidak ada. Dalam pelayanan publik harus dapat

merespon kejadian yang sifatnya *emergency* atau tidak terduga, tentunya selain dengan ditetapkan kebijakan atau program-program, perlunya ada inisiatif dari BPBD Rokan Hulu itu sendiri untuk merespon dari permasalahan banjir tersebut.

### **3.2 Faktor Penghambat Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam Pencegahan Bencana Banjir di Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2022**

Diatas telah dijabarkan mengenai kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam Pencegahan Bencana Banjir di Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2022, dan terdapat temuan penelitian masih ada kekurangan. Namun dalam menjalankan tugasnya terkait pencegahan bencana banjir terkadang tidak berjalan dengan baik dan memiliki hal yang membuat kinerja tersebut menjadi terhambat, berikut faktor penghambatnya:

#### **3.2.1 Kurangnya Koordinasi Antar Instansi**

Berdasarkan data dan temuan peneliti dilapangan bahwa kurangnya koordinasi dari 7 lembaga pemerintah dan non pemerintah yang seharusnya dapat berkolaborasi dengan BPBD dalam pencegahan bencana. Namun hasil capaian kerja menunjukkan angka yang buruk dimana tidak ada sama sekali hasil kerjasama dari 7 lembaga yang telah ditujukan sasaran kerja, hal ini menjadi bukti bahwa kurangnya koordinasi instansi terkait memang belum optimal dan masih jauh dari tujuan awal. Terlihat bahwa memang hasil kerjasama antar instansi tidak medatangkan hasil apapun

sehingga capaian kerjanya tercatat 0%, dimana seharusnya tugas pencegahan bencana tidak hanya menjadi tugas BPBD saja tetapi harus ada keterlibatan dari instansi yang telah ditunjuk dan memiliki tupoksi akan hal tersebut.

Memang terdapat faktor penghambat pencegahan banjir yaitu kurangnya Koordinasi antar instansi yang menyebabkan upaya pencegahan banjir menjadi tertunda bahkan tidak terealisasi. Inilah menjadi permasalahan dimana hanya mengandalkan satu instansi yang memiliki tugas pokok paling utama sehingga instansi lain yang dibutuhkan menjadi tidak peduli, hal ini membuat penilaian masyarakat buruk akan kinerja BPBD, tetapi sebenarnya yang terjadi BPBD telah melakukan upaya namun tidak dapat dukungan dari pihak yang diharapkan dapat membantu dan bekerjasama dalam pencegahan banjir.

### **3.2.2 Kendaraan Operasional Yang Kurang Memadai**

Salah satu faktor penghambat yang muncul ialah kendaraan yang kurang memadai sehingga sulit untuk menjangkau semua wilayah di Kecamatan Rambah secara keseluruhan, hal ini mengingat juga BPBD Rokan Hulu berperan dalam penyelesaian pencegahan bencana di semua wilayah Kabupaten Rokan Hulu. Mengenai permasalahan ini juga disinggung dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) BPBD Rokan Hulu yaitu “Perlu tambahan peralatan kerja di kantor dan fasilitas untuk mencakup seluruh wilayah Kabupaten Rokan Hulu”.

Berdasarkan data dilapangan bahwa jumlah kendaraan operasional yang tersedia rata-rata masih

berjumlah 1 (satu) pada hampir keseluruhan jenis kendaraan, hanya terdapat sepeda motor (14) dan sepeda motor kawasaki yang berjumlah 2 (dua), hal ini menjadi bukti nyata bahwa masih kurang kendaraan operasional yang tersedia untuk menjangkau wilayah berpotensi bencana banjir karena total kendaraan yang tersedia hanya berjumlah 19 kendaraan dengan 5 jenis kendaraan.

Permasalahan keterbatasan operasional ini membuat BPBD sulit mengerahkan semua personil mengingat terbatasnya kendaraan, terlebih kendaraan yang sudah tidak layak pakai, dan luasnya jangkauan wilayah serta potensi bencana yang bermacam macam sehingga yang ditangani BPBD tidak hanya bencana banjir saja namun terdapat bencana lain juga, oleh karena itu permasalahan ini harus dihadapi dan dicegah agar pencegahan banjir dapat dilakukan secara merata dan cepat serta mendatangkan kualitas kerja yang baik dengan keselarasan tanggungjawab dari BPBD Rokan Hulu.

### **3.2.3 Adanya Perubahan Iklim Global yang Sangat Drastis**

Salah satu faktor penghambat eksternal yang menjadi kendala BPBD Rokan Hulu dalam pencegahan banjir ialah perubahan iklim global yang membuat pencegahan banjir menjadi sulit untuk dilakukan. Dalam pencegahan banjir diperlukannya iklim yang stabil seperti salah satunya tidak adanya curah hujan yang berkapasitas tinggi yang dapat menyebabkan banjir sebelum selesainya dilakukan pencegahan. Dalam kajian risiko bencana salah satu faktor pemicu terjadinya banjir ialah curah hujan yang tinggi dan

lamanya hujan yang mengakibatkan meluapnya air sungai, drainase yang tidak mampu menyerap rasio air yang besar, penurunan permukaan tanah akibat tekanan air yang berkepanjangan dan dapat juga terjadi pembendungan alirasi sungai akibat longsor dan sedimentasi.

Permasalahan perubahan iklim global ini juga telah disinggung dalam rencana strategis (Renstra) BPBD Rokan Hulu Tahun 2021-2026 yaitu “adanya perubahan iklim global yang sangat ekstrim dan berpotensi meningkatkan intensitas bencana alam”, salah satu bencana yang dapat dipicu ialah banjir karena tingginya kapasitas air. upaya yang dilakukan BPBD terkait permasalahan ini yaitu bekerjasama dengan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengenai prediksi cuaca setelah itu baru melakukan koordinasi dengan dinas terkait, namun untuk saat ini dalam pencegahan banjir yang masih terhambat upaya yang dilakukan yaitu mengurangi rasio air di pemukiman agar dapat surut dan tidak menaggu aktivitas warga dengan waktu yang lama.

Faktor penghambat eksternal berupa perubahan iklim global yaitu salah satunya hujan berkepanjangan yang mengakibatkan upaya pencegahan banjir menjadi terhambat namun banjir terus terjadi akibat banyaknya rasio air yang turun dipemukiman warga, oleh karena itu upaya prioritas itu terletak pada pembuatan drainase dan stabilitas aliran sungai sehingga banjir cepat surut dan tidak ada luapan akibat alirasi sungai yang terganggu. Iklim yang ekstrem memang sering kali menjadi pemicu bencana alam salah satunya banjir yang terkadang tidak mampu dikendalikan oleh kajian

manusia, sehingga upaya yang mampu dilakukan hanya sebatas mengurangi bukan menghilangkan.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam pencegahan bencana banjir di Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2022, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kinerja Instansi Pemerintahan terdapat beberapa temuan peneliti dalam BPBD Rokan Hulu yaitu pada indikator Ekonomi belum berjalan dengan maksimal karena kurangnya anggaran serta tidak transparansinya petugas, terkait Efisiensi BPBD kabupaten Rokan Hulu dikatakan belum mampu dalam kinerjanya dilihat dari sumberdaya (SDM ataupun sarana prasarana) serta penyelenggaraan dalam pencegahan bencana yang dasarnya tidak efisien bisa disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu lemahnya koordinasi, pedoman atau SOP yang tidak ada, terbatasnya sarana dan prasarana serta peralatan yang mendukung. Begitu juga dengan efektifitas pelayanan BPBD Rokan Hulu dapat terlihat apabila banjir di Kecamatan Rambah setiap tahunnya mengalami penurunan, dimana rumusan kebijakan yang dikeluarkan serta solusi yang dihadirkan belum mampu mengatasi masalah banjir di Kecamatan

Rambah. Fleksibilitas pada penyelenggaraan pencegahan bencana yang dasarnya tidak efektif bisa disebabkan oleh lemahnya koordinasi, pedoman atau SOP yang tidak ada. Berdasarkan seluruh indikator yang telah dijelaskan diatas membuktikan bahwa kurangnya kinerja pelayanan BPBD Rokan Hulu baik itu dari sumberdaya maupun program-program yang dilakukan dalam pencegahan bencana.

2. Badan Penanggulangan Bencana (BPBD) Rokan Hulu dalam pelaksanaan tugasnya terdapat faktor penghambat berupa kurangnya koordinasi antar instansi, kendaraan operasional yang kurang memadai, terbatasnya anggaran yang tidak sesuai pengajuan awal pada Rancangan Rencana Kerja (RENJA), dan adanya perubahan iklim global yang sangat drastis sehingga pencegahan bencana sulit untuk dilaksanakan.

## B. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan pada penelitian ini, maka peneliti memberikan saran yaitu:

1. Kepada BPBD Rokan Hulu diharapkan mampu membuat anggaran khusus untuk menunjang program upaya pencegahan banjir yang tertulis dalam Renstra dengan rincian program yang jelas serta, agar terjadi transparansi anggaran. seluruh instansi terkait agar dapat melakukan

kerjasama yang baik dalam pencegahan banjir terutama pada pra bencana agar menemukan upaya dalam pencegahan. Serta diharapkan kepada BPBD Rokan Hulu Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan diharapkan adanya program yang jelas dan memiliki standar operasional prosedur (SOP) serta terdapat program inisiatif dalam pencegahan banjir.

2. Kepada Seksi Pencegahan diharapkan mampu menyusun rancangan program agar pertanggungjawaban dapat diukur melalui seberapa program dapat dijalankan dalam pencegahan banjir.

## Daftar pustaka

- Abdussamad, Dr. Zuchri. (2021). Metode Penelitian Kualitatif. Makassar: Syakir Media Press, 1-224.
- Ajeng Almaidatul Diniyah, Abdurrahman Faris Indriya Himawan, Nur Cahyadi. 2021. "Evaluasi Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Dalam Mencegah Dan Menanggulangi Bencana Alam Di Kabupaten Gresik Tahun 2021."
- Aulia, C., & Meiwanda, G. (2022). Strategi Pencegahan Bencana Banjir Oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Solok Sumatera Barat. *Journal of Research and Development on Public Policy*, 1(3), 35- 44.
- Diniyah, A. A. M. Evaluasi Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)

- Dalam Mencegah Dan Menanggulangi Bencana Alam Di Kabupaten Gresik Tahun 2021. *Arthavidya Jurnal Ilmiah Ekonomi*, 25(1), 92-104.
- Hamim, Prof. Dr. Sufian., & Suryandartiwi, Dr. Dra. Wiwik. (2022). *Organisasi Birokrasi Dan Manajemen Pemerintahan*. Jawa tengah: eureka media aksara, 1-266.
- Hanafiah, S. (2022). *Kinerja Badan Pencegahan Bencana Daerah Dalam Menanggulangi Bencana Banjir Di Kota Pangkalpinang (Doctoral Dissertation, Institut Pemerintahan Dalam Negeri)*.
- Harahap, Dr. Nursapiah. (2020). *Penelitian Kualitatif*. Sumatera Utara: *Wal Ashri Publishing*, 1-199.
- Harahap, N. (2019). *Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Dalam Penanggulangan Bencana Banjir Di Kota Pekanbaru (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau)*.
- Mahmudi. 2013. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN
- Mangkunegara, Dr. A.A. Anwar Prabu. (2021). *Evaluasi Kinerja SDM*. Bandung: Refika Aditama, 1-156.
- Muhammad. 2018. "Birokrasi (Kajian Konop, Teori Menuju Good Governance)." *Unimal Press* 53(9): 1689–99.
- Mustanir, A., Razak, M. R. R., Ikbal, M., Arif, M., Yuniarsih, R., Wicaksono, I., Wicaksono, F., Syamsuadi, A., Jabbar, A., Erfina, Hilman, Y. A., SompA, A. T., Luthfi, M., & Nursetiawan, I. (2022). *Pengantar Ilmu Pemerintahan*.
- Nugrahani, Dr. Farida. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif dalam penelitian pendidikam bahasa*. Solo: *Cakra Book*, 1-303.
- Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No.46 Tahun 2008 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- Peraturan Daerah No.10 Tahun 2018 RTRW Provinsi Riau Tahun 2018-2038.
- Peraturan Bupati Rokan Hulu No.82 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- Rohman. Abd., & Hardinanto, Dr. Willy Tri. (2019). *Reformasi Birokrasi Dan Good Governance*. Malang: *Intrans Publishing*, 1-148.
- Setiyono, B. (2012). *Birokrasi Dalam Perspektif Politik dan Adminitrasi* (Ketiga). Nuansa Cendekia. <http://eprints.undip.ac.id/41711/1/Birokrasi> Ilmu Pemerintahan.pdf
- Sadat Anwar. 2022. "Jurnal Penanggulangan Bencana Daerah." *Jurnal Studi Kepemerintahan* 1(Efektivitas

Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Pengurangan Resiko Bencana Di Kota Baubau): 1–9.

Syafril, S., & Sulandari, S. (2018). Analisis Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Dalam Pencegahan Bencana Banjir Di Kota Semarang. *Journal of Public Policy and Management Review*, 8(1), 65-81.

Undang Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana.

Undang- undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelelawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten KuantanSingingi, dan Kota Batam.